

KEPEMIMPINAN DALAM
DEMOKRATISASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN :
PERLUKAH DITERAPKAN DI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN ?

By TRIWAHYUNINGSIH

**KEPEMIMPINAN DALAM DEMOKRATISASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN : PERLUKAH DITERAPKAN DI UNIVERSITAS AHMAD
DAHLAN ?**

1
KHA.Dahlan tokoh dan pendiri muhammadiyah adalah salah satu agamawan yang memberikan teladan bagaimana menerjemahkan ajaran Islam dalam konteks pendidikan modern. Berdirinya ribuan lembaga pendidikan berbasis agama mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi modern **1** menggambarkan adanya kesinambungan gerakan modernisasi pendidikan tersebut secara lebih luas, kecenderungan berbasis agama ini berlanjut dalam demokratisasi di Indonesia. Peran ini melibatkan tokoh islam berbagai organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Persatuan Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Bahkan, Indonesia dikategorikan negara berpenduduk muslim terbesar yang berhasil membangun demokrasi. Kategori ini melampaui negara muslim lain. Sejumlah penelitian menunjukkan, peran agamawan sangat signifikan dalam membangun demokrasi di Indonesia (M Hilaly Basya, Kompas 30 Juni 2010).

Tradisi Demokrasi

Kim Hyung Jun dalam pengamatannya menemukan tradisi demokrasi yang praktis dan riil di Muhammadiyah misalnya **2** tradisi berdiskusi secara terbuka dan sopan, tradisi memperdebatkan isu-isu berdasarkan rasionalitas, tradisi menghargai pendapat orang lain, tradisi tidak mengasingkan dan memusuhi

orang yang berpendapat lain, tradisi mencari jalan keluar dengan cara damai dan yang dapat disetujui oleh semua pihak, dan tradisi menerima apa yang sudah diputuskan oleh musyawarah.(Kompas, 5 Juli 2010, Suara Muhammadiyah 1-15 Mei 2010 : 36)

Pertanyaannya mampukah kita membangun dan memelihara tradisi demokrasi sebagaimana penelitian Kim Hyung Jun dalam Perguruan tinggi/kampus Universitas Ahmad Dahlan ? Jika berbicara tentang Perguruan tinggi Muhammadiyah maka terkandung unsur-unsur sebagaimana tergambar dalam skema berikut : 197

Kepemimpinan Muhammadiyah

Ke depan kepemimpinan di perguruan tinggi Muhammadiyah, perlu mengedepankan dua unsur yaitu profesional dan keikhlasan. Menurut Ahmad Watik Pratiknya(1990, hal 141-142) setidaknya dapat diidentifikasi empat ciri utama kerja profesional. *Pertama* kerja yang memanfaatkan ilmu dan teknologi. *Kedua* ciri kerja yang dilakukan orang yang memang mampu untuk melaksanakan kerja tersebut (kesesuaian antara potensi dengan fungsi *the right man on the right place*). *Ketiga*, ciri kerja yang selalu memperhatikan dan mengupayakan optimasi hasil kerja.*Keempat*, pertimbangan rasionalitas yang tinggi, termasuk di dalamnya pemanfaatan *management*.

Dengan demikian pekerjaan profesional sangat mengutamakan keahlian dan efisiensi, karena itu para profesionalis dituntut kerja keras, gesit, tekun dan berorientasi pada hasil yang telah ditargetkan. Sebagai imbalannya,

mereka dibayar dengan upah yang sangat tinggi, mengingat para pekerja semata-mata menggantungkan nasibnya dari hasil kerja profesional tersebut. Di dalam Muhammadiyah pekerjaan profesional juga sangat diutamakan guna menggerakkan amal-usahanya dalam persaingan dengan berbagai lembaga yang juga mengutamakan profesionalisme. Warga Muhammadiyah selalu menghubungkan pekerjaan profesionalis dengan usaha-usaha bisnis.

Saya kira penerapan profesionalisme tidak boleh disalahtafsirkan secara keliru. Amal-usaha Muhammadiyah harus dikelola berdasarkan beberapa prinsip berikut:

1. Sebagai manifestasi dari dakwah Islam yang berprinsip ⁶ *amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar*.
2. Mengindahkan prinsip ukhuwah Islamiyah
3. Dikerjakan atas perencanaan yang tepat sesuai dengan tujuan yang telah digariskan
4. Memiliki sistem pertanggungjawaban, pelaporan dan evaluasi yang jelas. Di sini tercakup kontrol dan pengawasan.
5. Rasional, terbuka dan penuh tanggung-jawab.
6. Penentuan masa kerja yang ketat dan sistem pergantian pimpinan
7. Pemberian upah dan ⁵ insentif yang sesuai dengan beban kerja dan prestasi yang dicapai.
8. Menghindari korupsi, penyalahgunaan jabatan, nepotisme, fitnah dan gosip (M. Rusli Karim, 1990 : 140).

Selanjutnya pemimpin Perguruan Tinggi ke depan harus ikhlas, apa yang dimaksud dengan konsep ikhlas, bagaimana hubungannya dengan profesionalisme, yang kadangkala diperdebatkan tentang istilah keduanya, sebagaimana dikemukakan M. Rusli Karim, Sebagai berikut :

"Di dalam kehidupan sehari-hari umat Islam pada umumnya mempertentangkan *keikhlasan* dengan *profesionalisme*. Seakan-akan masing-masing memiliki kutub yang bertolak belakang secara diametral. Orang yang ikhlas diasumsikan tidak mungkin profesional, sebaliknya orang profesional

pasti tidak ikhlas. Lebih dari itu, ikhlas diidentikkan dengan gratis, sedangkan profesionalisme disamakan dengan uang yang berarti tinggi (mahal). Kesemuanya itu dilandaskan pada jargon "Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah" (1990 : 139)

Jika dikaitkan konsep kerja menurut Islam, ⁴ sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 84 yang artinya : "Katakanlah : tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya" Juga bisa dihubungkan dengan anjuran Nabi Muhammad agar bekerja dengan *itqan*, sungguh-sungguh. Dengan demikian Islam sejak dini telah merumuskan etika kerja yang bermuara pada efisiensi dan profesional. Keikhlasan merupakan sikap mental dalam melakukan sesuatu pekerjaan tertentu. Dalam Al-Quran kata "ikhlas" atau serumpunnya kebanyakan dihubungkan dengan kata "menyembah"/berbakti kepada Allah juga dengan kata "mengajak" ke jalan Allah. Dapat disimpulkan bahwa baik konsep kerja maupun keikhlasan dalam perspektif Islam selalu mengacu kepada realisasi pengabdian yang tulus dalam mencari ridhla Allah. Dengan kata lain, motif utama setiap perilaku muslim adalah pengabdian kepada Allah (M. Rusli Karim, 1990 : 139-140).

Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Watik Pratiknya sebagai berikut :

"Konteks pengertian profesionalitas di sini jelas bukan dikaitkan "imbalan". Sebagaimana yang secara salah profesional sering di padan-katakan dengan imbalan/uang. Profesionalitas juga tidak perlu dipertentangkan dengan keikhlasan, dengan amanah, dengan ibadah, dengan pengabdian, dan sebagainya (baca Antara Status Eksistensi dan Amanah SM nomer 24/68 Desember 1988). Karena profesionalitas tidak berkaitan dengan niat seseorang atau nilai/gagasan yang diperjuangkan, tetapi lebih merupakan *the style of action* perjuangan" (1990 : 141).

Bagaimana kehidupan berorganisasi dan bagaimana kehidupan dalam mengelola Amal Usaha Muhammadiyah sudah secara lengkap terdapat dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, (2003 : 8-10), sebagai berikut :

Kehidupan Berorganisasi

1. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh K.H Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya, karena itu menjadi tanggungjawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi (Persyarikatan) ini sebagai gerakan dakwah islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Setiap anggota, kader dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah Persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqomah, kepribadian yang mulia (shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan *amaliyah* yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan islam yang benar-benar menjadi *rahmatan lil alamin*.

3. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di Persyarikatan hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan seraya dijauhkan tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan Persyarikatan.

4. Menggairahkan *al-islam* dan *al-jihad* dalam seluruh gerakan Persyarikatan dan suasana di lingkungan Persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqamah dan memiliki ghirah yang tinggi dalam mengamalkan Islam.

5. Setiap anggota pimpinan Persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur-kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan.

6. Dalam lingkungan Persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah.

7. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat (seperti kuliah tujuh menit) dan selalu mengindahkan waktu sholat dan menunaikan shalat jama'ah sehingga tumbuh gairah keberagaman yang tinggi yang menjadi bangunan bagi pembentukan kesalehan dan ketaqwaan dalam mengelola persyarikatan.

8. Para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran al-qur'an dan Sunnah Nabi dan amalan-amalan Islam lainnya.

9. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan kepentingan Persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dakwah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi.

10. Setiap anggota Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam Persyarikatan tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat secara formal dalam organisasi maupun amal usaha hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan *akhlaq* Islam.

11. Setiap anggota pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, amaniyah, dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin.

11. Dalam setiap lingkungan Persyarikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah serta jami'iyah sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan dakwah yang kokoh.

12. Dengan semangat *tajdid* hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa dakwah yang tinggi sehingga dapat mengikuti dan memelopori kemajuan yang positif bagi bagi

kepentingan *'izzul islam wal muslimin* (kejayaan Islam dan kaum muslimin) dan menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta alam).

13. Setiap anggota pimpinan dan pengelola Persyarikatan di manapun berkiprah hendaknya bertanggung-jawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan (komitmen yang *istiqamah*) dan kejujuran yang tinggi, serta menjauhkan diri dari berbangga diri (sombong dan *amanyah*) manakala dapat mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah pada hakikatnya karena dukungan dari semua pihak di dalam dan di luar Muhammadiyah dan lebih penting lagi karena pertolongan Allah SWT.

14. Setiap anggota pimpinan maupun warga Persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan *taqlid, syirik, bid'ah, takhayul dan khurafat*.

15. Pimpinan Persyarikatan harus menunjukkan *akhlaq* pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang islami.

E. Kehidupan dalam Mengelola Amal Usaha

1. Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu dari usaha-usaha dan media dakwah Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan Persyarikatan dan seluruh pimpinan dan pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi dakwah.

2. Amal Usaha Muhammadiyah adalah milik Persyarikatan dan Persyarikatan bertindak sebagai badan hukum/yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan Persyarikatan hendaknya dapat diinventarisi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidag dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaanya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

3. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan Persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga, yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan bertentangan dengan amanat.

4. Pimpinan amal usaha muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut. Karena itu status keanggotaan dan komitmen pada misi Muhammadiyah menjadi sangat penting bagi pimpinan tersebut agar yang bersangkutan memahami secara tepat tentang fungsi amal usaha tersebut bagi Persyarikatan dan bukan semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan-kepentingan Persyarikatan

5. Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah Persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Persyarikatan dengan melaksanakan fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.

6. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman.

7. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan sikap amanah dan tanggung jawab akan kewajibannya. Untuk itu setiap pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan.

8. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggungjawabnya, khususnya dalam hal keuangan/kekayaan kepada pimpinan Persyarikatan secara bertanggungjawab dan bersedia diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. Pimpinan amal usaha muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan islami dalam amal usaha yang menjadi tanggungjawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat dakwah maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.

10. Karyawan amal usaha muhammadiyah adalah warga (anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah diharapkan karyawan Mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan bersikap berlebihan.

11. seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntukan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas dan ibadah

12. Seluruh pimpinan, karyawan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahmi dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis (persaudaraan dan kasih sayang) tanpa

mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing.

13. Seluruh pimpinan, karyawan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan taqarub kepada Allah SWT dan memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlaq melalui pengajian, taddarus, serta kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan bentuk-bentuk ibadah dan mu'ammalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah.

Dengan mengamalkan kehidupan berorganisasi, kehidupan dalam mengelola Amal Usaha Muhammadiyah sebagaimana rambu-rambunya telah dipaparkan di atas sebenarnya mau tidak mau kampus /pendidikan khususnya Universitas Ahmad Dahlan merupakan pilar yang amat penting sebagai penopangnya. Tanpa adanya pendidikan yang baik, sulit diharapkan demokrasi dapat lahir dan berkembang secara baik.

Demokratisasi dalam penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan sebagaimana maknanya adalah dari, oleh dan untuk warga UAD. Pembuatan kebijakan - kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan bersama seharusnya jangan meninggalkan aspirasi dari bawah. Pemegang tampuk pimpinan beserta jajarannya memproses seluruh aspirasi yang muncul dari bawah kemudian muncullah kebijakan-kebijakan, yang seluruh

kebijakan tersebut memang menjadi kehendak bersama, itulah makna sederhana demokrasi.

Artinya demokratisasi di lingkungan kampus dalam wujud apapun dapat memberikan berkah bagi warganya, karena demokrasi memang untuk rakyat, demokrasi harus dikemas dalam etika sehingga tidak menimbulkan konflik, etika tersebut sudah lengkap terdapat dalam aturan kehidupan berorganisasi dan mengelola Amal Usaha Muhammadiyah, kurang apa lagi ??????????. Yang kadangkala tidak dimengerti oleh kalangan bawah yang awam adalah reformasi atau perubahan apapun bentuknya sebenarnya untuk siapa dan apa artinya bagi dirinya, yang ia tahu hanyalah bekerja dan bekerja. Ini merupakan tantangan pemimpin untuk menjawabnya !.

Untuk mengakhiri tentang kajian demokratisasi kampus, perlu kiranya dinukilkan ungkapan Alexis de Tocqueville sebagai berikut ”

” Demokrasi bagaikan gelombang air laut, yang hanya surut untuk bergulung kembali dengan kekuatan yang lebih dahsyat dan orang segera menyaksikan bahwa terjangan demokrasi akan selalu memperoleh pijakan yang kokoh ” (Soegeng Koesman, 2009 : 34)

DAFTAR PUSTAKA

Soegeng Koesman.2009. *Membangun Karakter Bangsa*. Yogyakarta Tiara Wacana.

³
Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah.1990. *Muhammadiyah: Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*. Yogyakarta , Malang : Kerjasama PT Tiara Wacana dengan UMM Press.

¹
Tim Penyusun *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. 2003. Yogyakarta.

Suara Muhammadiyah,No. 9/Th. Ke-95. 1-15 Mei 2010. *Membangun Tradisi Demokrasi Muhammadiyah*.

Kompas, 30 Juni 2010

_____, 5 Juli 2010

KEPEMIMPINAN DALAM DEMOKRATISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN : PERLUKAH DITERAPKAN DI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN ?

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1 | muhammadiyahstudies.blogspot.co.id Internet | 101 words — 4% |
| 2 | muhammadiyahstudies.blogspot.co.uk Internet | 49 words — 2% |
| 3 | media.neliti.com Internet | 16 words — 1% |
| 4 | docobook.com Internet | 10 words — < 1% |
| 5 | www.bit.lipi.go.id Internet | 8 words — < 1% |
| 6 | almanhaj.or.id Internet | 8 words — < 1% |

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON